

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI LAIKA DI KELURAHAN TOBUUHA KECAMATAN PUUWATU KOTA KENDARI

Ma'ruf¹, Onno Sahlania², Ashariyana³ & Rivai Mana⁴

¹Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: maruf.mansur75@gmail.com

²Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: onno.sahlania80@gmail.com

³Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: ashariyana.89@gmail.com

⁴Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Pejuang. R.I

Email: rivai.mana@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudahan pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi LAIKA di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi LAIKA di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif deskriptif yang memusatkan pada satu objek tertentu, dimana prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data pedoman wawancara dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi LAIKA sebagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Tobuuha, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi indikator pelayanan publik yakni; transparansi, partisipasi dan efisiensi meskipun belum maksimal, aplikasi ini sudah dapat memberikan kemudahan dengan pelayanan yang tepat waktu, tidak memiliki biaya (gratis), dan prosedur yang tidak berbelit-belit sehingga memberikan kemudahan kepada pemerintah kelurahan dan masyarakat Kelurahan Tobuuha. Implementasi aplikasi Laika di Kelurahan Tobuuha sangat terbantu dengan pelayanan baik, dimana petugas piket LAIKA melayani dengan ramah pada saat menyampaikan informasi secara transparan dan tanpa adanya biaya proses pengurusan surat keterangan/izin termasuk sangat cepat dengan menggunakan aplikasi LAIKA ini, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama.

Kata kunci: Implementasi; Pelayanan Berbasis LAIKA

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) merupakan langkah pemerintah Indonesia menuju Good Governance yang kemudian didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan electronic e-government atau e-government menjadi langkah awal Indonesia menerapkan kebijakan e-government tersebut melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan perlunya membangun kepercayaan masyarakat

atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Kehadiran teknologi internet tersebut memungkinkan pekerjaan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Walaupun pada saat itu pemerintah Indonesia menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan komputer. Saat itu belum menggunakan istilah e-government tapi menggunakan istilah komputerisasi. Di Kota Kendari, penggunaan teknologi informasi juga mulai digalakkan. Hal itu ditandai dengan peluncuran visi dan misi kota Kendari.

Pada aplikasi LAIKA layanan unggulan dan yang paling banyak diakses adalah layanan kependudukan sebagai dasar masyarakat dalam melakukan kepengurusan administrasi. Untuk masyarakat yang mengakses layanan kependudukan terlebih dahulu menginstal aplikasi LAIKA dari play store kemudian selanjutnya membuat akun dengan memasukkan NIK dan KTP aktif pada kolom yang disediakan. Lalu selanjutnya masuk ke nomor WhatsApp dan email aktif kemudian membuat password dan meng-klik "daftar". Setelah proses ini selesai, masyarakat telah dapat menggunakan layanan aplikasi LAIKA tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti lapangan nampak bahwa pelayanan aplikasi menggunakan LAIKA belum berjalan optimal oleh karena masyarakat belum terlalu memahami sepenuhnya terkait proses pengoperasian aplikasi LAIKA.

KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan - kepentingan yang mewakili system politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan public sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan - hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan public adalah 'apasaja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan public adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil – hasil tertentu.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan public setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hokum (*authoritativechoice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Webster, pengertian implementasi secara etimologisa dalah "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu)" (Wahab, 2014). Pengertian lain dari Donald S. Van Metter dan Carl E. Vadalam Widodo (2011) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan "*Policy implementation encompasses those action by the public and private individual (or group) that is directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes one-time efforts to transform decisions into operational terms and continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by a policy decision*". Pendapat lain dari Mazmanian dan Sabtier dalam Widodo (2011) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa "*The subject of policy implementation is understanding what actually happens after a program is enacted. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantives, which impact on the people and event*."

Sehingga Widodo (2011) memberikan kesimpulan tentang pengertian implementasi sebagai berikut: Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai tingkat organisasi dan birokrasi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Wahab (2014) Implementasi kebijakan dapat dilihat dari (1) pembuat kebijakan, (2) pelaksana lapangan dan (3) kelompok sasaran (*target groups*).

Van Metter dan Van Horn dalam Wahab (2014), menyatakan bahwa proses implementasi adalah "*those action by public or private individuals groups that are directed the achievement of objectives set forth in prior decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu – individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Konsep E-Government

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya *e-government* adalah penerapan produk – produk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan. Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sector kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (*Government Information System*) kini telah bergeser menjadi istilah *e-government* yang sering dimaknai dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasinya.

E-government adalah layanan *Information and Communication Technologies* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya. *E-government* memiliki 4 hubungan dasar : *Government to Citizen / G2C* (pemerintah dengan warga), *Government to Business / G2B* (pemerintah dengan swasta), *Government to Government / G2G* (pemerintah dengan pemerintah), *Government -to- Employee / G2E* (Pemerintah dengan Pegawainya /ASN). Alshehri dan Drew (2010) mengemukakan bahwa G2E adalah suatu bentuk relasi antara institusi pemerintahan dengan pegawainya, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada para pegawai pemerintahan secara elektronik.

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan public atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan (Ratminto dan Winarsih, 2007).

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan public dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan kepuasan kepada penerima pelayanan. Penyelenggara pelayanan Bab 1 Pasal 1 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini memusatkan pada satu objek tertentu, dimana prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data Hubungannya dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi guna mengumpulkan data untuk diolah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pelayanan Publik melalui Aplikasi LAIKA di Kelurahan Tobuuha

Sesuai kondisi yang ada di lapangan di Kantor Kelurahan Tobuuha Kecamatan Mandonga Kota Kendari proses pelaksanaan pelayanan e- government berjalan baik dimana didalam proses pelayanan administrasi masyarakat mulai dari awal kedatangan masyarakat di kantor kelurahan hingga selesainya proses pelayanan yang dibutuhkan masyarakat berjalan sangat baik dan cepat termasuk di dalamnya proses pelayanan administrasi berbasis aplikasi LAIKA dimana masyarakat sangat terbantu dengan konsep pelayanan secara digital online berbasis aplikasi sehingga pemerintah dalam hal ini bias mendapatkan nilai value dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan Bpk Icun Cun bahwa *pelayanan yang bersifat administrasi berbasis aplikasi sangat efektif membantu masyarakat yang ada di kelurahan Tobuuha dengan adanya sistim informasi dan pelayanan ini masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam mendaptkan hasil pelayanan yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya cukup dengan menggunakan HP jenis android dan mendownload aplikasi LAIKA yang ada di Play Store (Wawancara03 Januari2023).*

Lanjut beliau juga menyampaikan bahwa *asa 14 item pelayanan yang tersedia melalui aplikasi LAIKA tapi hanya 12 item yang belum bisa di akses yaitu pelayan surat keterangan Cerai dan ijin keramaian dikarenakan pelayanan tersebut terkait dengan instansi Pengadilan dan Kepolisian sehingga belum bias dijalankan (Wawancara10Januari2023).* Sesuai dengan wawancara dari warga masyarakat Pak Archan saat wawancara menyampaikan bahwa *engurus Surat Keterangan Usaha dengan menggunakan LAIKA tidak sulit hanya diawal saja dibantu dengan petugas LAIKA saat memasukkan data di aplikasi setelah itu prosesnya tidak lama yang penting document lengkap tidak menunggu lama (Wawancara 21 Februari2023).* Sama seperti yang diungkapkan warga masyarakat Ibu Cindi bahwa *sangat terbantu dengan adanya pelayanan administrasi secara online menggunakan aplikasi LAIKA bahkan lebih terbantu lagi dengan tersedianya WIFI sehingga tidak pusing pikirkan paket data (Wawancara 21 Februari 2023).*

Sesuai hasil observasi lapangan terkait kecepatan dalam proses pelayanan berbasis aplikasi LAIKA belum optimal khususnya masyarakat yang belum mengetahui proses pelayanan berbasis aplikasi khususnya masyarakat lanjut usia dan masyarakat yang tidak memiliki HP android sehingga proses input data pada aplikasi masih dilakukan oleh petugas piket, setelah proses pengecekan terhadap berkas yang dibawa pemohon setelah dinyatakan lengkap.

Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik Bpk Icuun Cun yang menjadi informan penelitian, mengatakan bahwa *bahwa masyarakat sebetulnya memang masih ada yang kurang paham menggunakan aplikasi LAIKA sehingga proses input masih dilakukan pendampingan oleh petugas piket (Wawancara 10 Januari 2023)*. Berdasarkan wawancara dengan staf pegawai kelurahan pada umumnya mengatakan kendala yang bisa menghambat kelancaran penerapan aplikasi yaitu adanya keterbatasan jenis HP yang bisa digunakan, kendala jaringan internet yang terkadang tidak stabil, juga kurangnya pengetahuan dari pengguna aplikasi LAIKA.

Hal ini juga disampaikan warga masyarakat Ibu Fitri Azhari bahwa *tidak bias melakukan proses pelayanan secara online dikarenakan HP saya tidak bias mensupport untuk bias mendownload aplikasi LAIKA (Wawancara 30 Januari 2023)*. Berdasarkan hasil verifikasi data pelayanan yang dibuat sesuai dengan buku catatan pelayanan yang diisi oleh masyarakat, faktanya bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan Tobuuha sudah cukup baik sesuai yang diungkapkan Bpk Icuun Cun bahwa *partisipasi di tahun 2022 cukup baik terutama di bulan november (sebanyak 289 orang) dimana pelayanan administrasi kebutuhan Surat Keterangan Tidak Mampu sangat tinggi terkait kebutuhan masyarakat pencairan program nasional pemerintah BLT (Wawancara 23 februari 2023)*.

Berdasarkan hasil verifikasi data pelayanan yang dibuat sesuai dengan buku catatan pelayanan yang diisi oleh masyarakat, faktanya bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan Tobuuha sudah cukup baik sesuai yang diungkapkan Bpk Icuun Cun bahwa *partisipasi di tahun 2022 cukup baik terutama di bulan november (sebanyak 289 orang) dimana pelayanan administrasi kebutuhan Surat Keterangan Tidak Mampu sangat tinggi terkait kebutuhan masyarakat pencairan program nasional pemerintah BLT (Wawancara 23 februari 2023)*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan aplikasi Laika sebagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Tobuuha, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi indikator pelayanan publik yakni; transparansi, partisipasi dan efisiensi meskipun belum maksimal, aplikasi ini sudah dapat memberikan kemudahan dengan pelayanan yang tepat waktu, tidak memiliki biaya (gratis), dan prosedur yang tidak berbelit - belit sehingga memberikan kemudahan kepada pemerintah kelurahan dan masyarakat kelurahan Tobuuha. Implementasi aplikasi laika di kelurahan Tobuuha sangat terbantu dengan pelayanan baik, dimana petugas piket LAIKA melayani dengan ramah pada saat menyampaikan informasi secara transparan dan tanpa adanya biaya proses pengurusan surat

keterangan / izin termasuk sangat cepat dengan menggunakan aplikasi LAIKA ini, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Sari, Kusuma Dewi; Winarno, Wahyu Agus. (2015). *Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governancedi Indonesia*. **Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen**, [S.l.], v. 11, n. 1, feb. 2015. ISSN 2459-9816. Available at: <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1192>>. Date accessed: 29 oct. 2022.
- Dash, Satyabrata (2016). e-Governance paradigm using cloud infrastructure: benefits and challenges.
- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Forman, M (2005). Using It to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government Journal e-Governemnt and Information Technology, page 27.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
<https://laika.kendarkota.go.id/>
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Junaidi. (2005). E-Government Dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menjadi Good Governance. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 9 No.1 Mei 2005.
- Kese, J (2010). *Perencanaan Strategis Sistem Informasi (SI) Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Lindblom, Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Airlangga.
- Mick Moore. 1993. *Declining to Learn From the East? The World Bank on „Governance and Development“*, Institute of Development Studies
- Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Rajawali, Jakarta, 1991, h.176
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook*:
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustari, N. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik* (Anwar (ed.)). PT Leutika Nouvalitera.
- Nasution, M. N. (2004). *Manajemen Jasa Terpadu : Total Service Management*. PT. Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1999, h.571
- Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Retnowati, Nurcahyani Dewi; Retnowati, Daru. (2008). *Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat*. Seminar Nasional Informatika (Yogyakarta: UPN “Veteran”).
- Salman, S., Arifin, Z., & Hasdinawati, H. (2023). Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam Layanan Parawisata di Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2(1), 45-50.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.128
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susartono. (2006). E-Government di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS*, Volume 2 No.1 April 2006.
- Tjiptono, F. (2000). *Manajemen jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, AR. 1988. *Elemen-Elemen Sistem Kebijakan Publik*. Jakarta : Gunung Agung.

Ma'ruf¹, Onno Sahlania², Ashariyana³ & Rivai Mana⁴

- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, AR. 1988. Elemen-Elemen Sistem Kebijakan Publik. Jakarta : Gunung Agung.
- Weill, Peter, W.Ross, Jeanne, 2004, IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta. PT Buku Kita
- World Bank. (2002). New Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.
- Zainal, A. S. (2019). Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi. page 10-19.
- Zainal, A. S. (2019). Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi Dan Teknologi. 10–19. <https://laika.kendarikota.go.id/>